

KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK

Erik Devy Wahyudi¹

Abstrak: Tuntutan Reformasi Birokrasi dan tantangan era globalisasi saat ini merupakan tantangan kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah sistem pertahanan negara khususnya Kowil dalam membina pertahanan negara yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengabdianya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan wawasan kebangsaan yang efektif sebagai roh dari ketahanan nasional demi terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan (AHGT) baik dari luar maupun dari dalam serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi. Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam mengemban tugas-tugas kewilayahan agar dapat menganalisa fenomena-fenomena lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.

Kata Kunci: *Kowil, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, Administrasi Publik.*

¹ Erik Devy Wahyudi, S.I.P. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Majalengka. Jurusan Ilmu Administrasi. Konsentrasi Kebijakan Publik. Angkatan 12. email : erikwahyudi011@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai-nilai Kebangsaan Bangsa Indonesia dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dewasa ini dirasakan semakin menurun, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh arus perubahan dan transformasi sebagai dampak dari globalisasi dunia, negara-negara modern terhadap negara - negara berkembang termasuk dalam hal ini negara kita Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menyebutkan Wawasan Kebangsaan adalah :

²Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

⁴Bahwa perang dimasa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menuduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis, (Napoleon abad XVIII).

⁵Cicero, seorang filsuf dan negarawan Yunani, menyatakan bahwa "kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh karakter warga

wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dilansir dari Republika Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan. ³Wawasan Kebangsaan atau Bela Negara Bangsa Indonesia terlalu rendah. Berdasarkan survei masalah Wawasan Kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95. (<http://www.republika.co.id/> 25 Maret 2015)

Paham Kaisar Naoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon merupakan tokoh revosioner di bidang cara pandang, selain penganit baik dari Machiavelli. Naoleon berpendapat :

negaranya" Selanjutnya Toynbee, sejarawan Inggris, menyatakan bahwa sembilan belas dari dua puluh satu peradaban besar dimuka bumi ini hancur bukan karena penaklukan dari negara lain tetapi karena pelapukan moral dari dalam.

Leonard D.White dalam buku *Teori Organisasi* karangan Yunus dan Wahyudin, mengemukakan bahwa administrasi adalah

⁶Suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok negara atau

² Permendagri Nomer 71 Tahun 2012

³ <http://www.republika.co.id/> 25 Maret 2015

⁴ <http://www.wikimu.com/> Napoleon abad XVIII// 15 maret 2012.

⁵ BPPM Provinsi DIY, *Seminar Kesadaran Berbangsa Bernegara*, Yogyakarta: 2012

⁶ Yunus dan Wahyudin, *Teori Organisasi*, Majalengka, UNMA: 2013 hal 2

swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya, (2013:2).

Menyikapi pernyataan-pernyataan diatas, untuk menguasai suatu bangsa yang akan dijajah tidak hanya invansi militer secara terbuka namun dengan merusak secara massif lalu menguasai⁷ aspek alamiah (tri gatra) terdiri dari geografi, demografi, sumber daya alam dan aspek sosial (panca gatra) terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) bangsa tersebut.

Perang modern di masa sekarang ini ialah perang melibatkan pihak ketiga / adu domba (*proxy war*), perang asimetris (*asymmetric warfare*), dan perang hibrida (*hybrid warfare*).

Dinamika yang berkembang dewasa ini Kowil (Komando Wilayah) mengalami perubahan pasca Reformasi tahun 1998 serta lahirnya UURI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. TNI dituntut profesional dalam menjalankan politik Negara sebagai alat pertahanan, namun pasca reformasi tersebut ancaman kedaulatan terjadi tidak hanya ancaman nyata secara fisik antara lain sparatis dan terorisme dan luntarnya nilai-nilai nasionalisme masyarakat. Hal ini yang menyebabkan tindakan-tindakan disintegrasi bangsa mudah dilakukan.

Fenomena saat ini masih ada saja yang berfikir kalau tugas militer hanya perang dan negara saat ini dirasa aman tidak ada perang/invansi militer, masih ada anggapan kemandirian TNI-Rakyat di segala bidang

dianggap TNI masih ingin mengambil perannya seperti dimasa Orde Baru dan anggapan tidak ada kerjaan serta masih pro kontra keberadaan Kowil mempengaruhi pengoptimalisasiannya.

Dengan demikian salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut transformasi Kowil tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Komando Kewilayahan (Kowil) dimasa transformasi paradigma tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu⁸ penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010:6). Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah⁹ penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran

⁷ Wirman Burhan, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta, STMT:2014 hal 103

⁸ L Maleong, 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya. Bandung, hal 6.

⁹ Ibid.

Komando Wilayah (Kowil) dimasa transformasi paradigma tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik.

2. ISI PENELITIAN

2.1 Kowil : Komando Wilayah

Dalam organisasi TNI AD, dikenal yang namanya aparat komando wilayah yang terdiri dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa. Babinsa umumnya berada di wilayah desa/kelurahan.

¹⁰Babinsa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Babinsa memiliki posisi strategis berada di tengah masyarakat dan sehari-hari bersama masyarakat. Babinsa diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa/kelurahan. Babinsa diharapkan dapat melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap berbagai permasalahan dan persoalan pertahanan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat.

Idealnya Babinsa memiliki ruang kerja/pos di Kelurahan/Desa binaan serta memiliki struktur mitra ketahanan. Namun dengan apa yang terjadi sampai saat ini dari awal pembentukan Kowil dikarenakan sumber daya baik itu prajurit maupun peralatan yang kurang memadai, sarana prasarana satuan Kowil masih sangat kurang dan tanggung jawab lebih dari satu wilayah binaan namun untuk masalah itu TNI AD mengsiaskannya

dengan jabatan “Penghubung” agar sinergitas dari tiap-tiap wilayah sipil terpenuhi.

2.2 Kowil Tentara Penjaga Pos

Dinamika yang terjadi di era Orde Baru atas evaluasi yang dilakukan terhadap Orde Lama selain upaya negara-negara kolonial ingin menjajah kembali Indonesia yang belum mengakui kedaulatannya, pemberontakan-pemberontakan pun terjadi oleh kelompok yang tidak sepaham dengan idiologi negara sampai ingin memisahkan diri dari NKRI, maka dari itu pemerintahan Orde Baru membentuk Komando Teritorial (Koter) berstrukturkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa yang memiliki wilayah binaan dari tingkat Provinsi sampai Kelurahan/Desa.

Kekuatan TNI di era Orde Baru dalam melaksanakan bimbingan teritorial terhitung mudah dilaksanakan walaupun kekuatan Apter (Aparatur Teritorial) pada masa itu kecil dibandingkan dengan saat ini. Kekuatan politik ABRI di pemerintahan sangat kuat sehingga sinergitas serta koordinasi terlaksana sangat baik. Kala itu Organisasi Kodim jumlahnya tidak sebanyak sekarang, Koramil yang membawahi Babinsa sebagai ujung tombak di wilayah sangat minim Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarananya. Satuan organisasi Koramil dengan personil yang sedikit bahkan lima orang personilpun sanggup membina wilayah berpuluh-puluh desa bahkan ada Koramil yang hanya memiliki anggota Babinsa 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Babinsa membina 10 Desa dan untuk kendaraan

¹⁰ Suwarno Sutikno, *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2011 hal 10

operasionalpun yang dimiliki hanya 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan dinas Danramil dan yang 1 (satu) unitnya kendaraan dinas operasional Babinsa dipakai bergiliran, meskipun dengan segala keterbatasan, tantangan serta ancaman khusus wilayah-wilayah rawan Apter kala itu dapat mengemban tugas menjaga kedaulatan negara, sehingga penulis menilai kala itu tugas Apter seperti Tentara penjaga pos keamanan berjadwal piket, karena kondisi tidak memungkinkan setiap hari melaksanakan pembinaan ke wilayah binaan.

Namun dengan kekuatan politik pemerintahan Orde Baru membuat ABRI khususnya Kowil terlena sehingga pengembang organisasinyaapun sampai saat ini lamban tidak seperti Otoritas Sipil dan Kepolisian, paradigma masa lalu merasa tidak memerlukan kekuatan aparat wilayah yang besar sudah dapat diatasi.

Kekuatan politik ABRI pada masa Orde Baru memudahkan kinerja Aparat Teritorial dalam menjaga wilayah NKRI yang berideologi Pancasila namun cara-cara yang dilakukan dianggap tidak profesional sebagai militer di negara demokrasi yang terjun bebas di perpolitikan, orde baru di cap sebagai rezim otoriter yang menggunakan kekuatan militer untuk kekuasaan sehingga situasi politik yang dinamis memungkinkan perubahan baik secara bertahap (evolusi) maupun paksa (revolusi), dikala kebutuhan rakyat tidak tercukupi mengakibatkan konflik horizontal dan

vertikal sampai pada runtuhnya rezim kekuasaan.

2.3 Kowil Tentara Administrasi Publik

¹¹Gelombang reformasi Mei 1998 memaksa ABRI mengadakan perubahan internal dalam organisasi hingga paradigmanya. Beberapa langkah awal reformasi organisasi TNI adalah mengubah nama ABRI menjadi TNI, kemudian diikuti dengan langkah restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Misalnya, likuidasi beberapa organisasi ABRI yang dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi seperti Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) yang di era Orde Baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur pemerintahan sipil, likuidasi Kepala Staf Komando Teritorial (Kaster) TNI, serta likuidasi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.

Tuntutan dipolitisasi militer pada reformasi 1998 menuntut TNI yang profesional. Dimasa transformasi TNI sejak awal Era Reformasi tema yang diusung oleh TNI dalam mengisi HUT TNI tiap tanggal 5 Oktober bertemakan Prajurit TNI Siap Mengembalikan Citra TNI dan setelah berjalannya reformasi TNI berhasil mengembalikan citra kepercayaan di mata rakyat maupun di dunia Internasional, kebijakan TNI menyesuaikan dengan visi misi pemerintah serta kegiatan organisasinyaapun menyesuaikan road map reformasi birokrasi. Dan seiring waktu berjalan tema HUT TNI mengalami perkembangan

¹¹ Naskah Kontras, *Satu Dekade Keberhasilan TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)*, Surabaya, Ad Hoc.

sesuai dengan tantangan globalisasi menjadikan bangsa yang mandiri. Pendekatan tema menyesuaikan tuntutan zaman.

Reformasi Birokrasi yang sedang berlangsung menuntut perubahan sistem pemerintahan yang bersih serta profesional terjadi di semua sektor organisasi pemerintahan tidak terkecuali TNI. Sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung saat ini merupakan tantangan TNI khususnya Kowil agar dapat tetap bersinergi dengan Pemerintahan Daerah peran Kowilpun diuji kembali mampukah Kowil bersinergi dengan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, perlahan tapi pasti Kowil mampu menyesuaikan keadaan dengan keterbatasan yang dimiliki, meskipun dirasa lamban dalam pengembangan organisasinya Kowil berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah Kemanunggalan TNI-Rakyat semakin dekat dan kuat. Lambannya pengembangan organisasi Kowil yang penulis maksud ialah dimana Reformasi Birokrasi ini pengembangan organisasi pemerintahan dituntut peningkatan satuan organisasinya baik itu organisasi Otoritas Sipil, Kepolisian dan Militer menyesuaikan dengan dinamika perubahan sosial saat ini menuntut Aparatur Birokrat bekerja secara efektif, efisien dan profesional agar terwujudnya good governance.

Tatalaksana pemerintahan otoritas sipil dan Kepolisian telah mengembangkan organisasinya struktur organisasi tata kelola (SOTK) dikembangkan dan pangkat/golongan

pimpinan di organisasi ditingkatkan, namun untuk Kowil melaksanakan pengembangan organisasinya hanya beberapa prioritas saja yang ditingkatkan dan penambahan personil di satuan. Dalam hal ini tuntutan tugas yang di emban aparat Kowil mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan keadaan organisasinya, upaya optimalisasi yang dilakukan belum berhasil terlaksana karena masih pro kontra keberadaan Kowil.

Dinamika perubahan sosial yang terjadi menuntut Kowil agar dapat menyesuaikan diri bagaimana pendekatan yang dilakukan saat ini agar kemanunggalan TNI-Rakyat tetap terjalin dalam membina wawasan kebangsaan.¹²Dalam kondisi yang demikian kita kembali ingat semangat nasionalisme tatkala mempertahankan kemerdekaan pada masa lalu, kita juga teringat akan pemikiran klasik yang dikembangkan oleh “Napoleon Bonaparte, yaitu mengubah tentara profesional, tentara bayaran menjadi tentara rakyat”. Meskipun tuntutan TNI menjadi tentara profesional tidak semerta-merta menghilangkan jati diri TNI “sebagai tentara rakyat” sebagaimana kutipan Jendral Besar Soedirman.

Kowil dimasa transformasi saat ini dan tantangan globalisasi merubah wujudnya menjadi tentara administrasi publik yang memberikan pelayanan kepada rakyat demi tercapai tujuan negara dan ketahanan nasional yang erat hubungannya dengan wawasan kebangsaan dikarenakan sifatnya yang

¹² Herman, B. Wilayah Pertahanan, Kemanunggalan TNI-Rakyat Bagi Kejayaan Bangsa: <http://www.wilayahpertahanan.com>. 26 Juli 2015.

dinamis sebagaimana menurut pendapat Susilo Bambang Yudhoyono :

¹³Wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan tak berubah dari waktu ke waktu, sebaliknya ia bersifat dinamis. Namun bukan berarti juga wawasan kebangsaan tersebut dapat diubah-ubah sekehendaknya. Seperti halnya membangun suatu rumah tangga, ada bagian yang tidak mudah untuk diubah dan ada bagian yang relatif mudah berubah, (Yudhoyono: 2004).

Banyak pengertian-pengertian administrasi negara menurut para ahli, namun penulis menyimpulkan administrasi negara ialah ¹⁴proses keseluruhan kerja sama lembaga-lembaga negara antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif beserta seluruh lembaga-lembaga lainnya dalam dan luar pemerintahan serta masyarakat untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini negara Indonesia mempunyai tujuan atau cita-cita yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan :

¹⁵Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat keharusan untuk dapat mengelola perubahan agar mampu menghasilkan bangun bangsa dan negara seperti yang kita cita-citakan bersama. Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu bangsa senantiasa memiliki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan itu. Tanpa adanya pemahaman wawasan kebangsaan yang benar, perubahan

lingkungan tersebut akan sulit dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dan negara, (Yudhoyono: 2004).

¹⁶Maka untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang tertuang pada UUDRI 1945 di perlukan suatu kerja keras atau keuletan, keuletan tersebut kita kenal yaitu suatu konsep Ketahanan Nasional meliputi aspek - aspek Geografi, Demografi, Kekayaan alam (Tri Gatra) / aspek alamiah dan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Panca Gatra) / aspek sosial.

Oleh karena itu wawasan kebangsaan sangat penting guna mencapai tujuan-tujuan Negara Indonesia, inilah upaya yang dilakukan menciptakan kemandirian TNI-Rakyat karena untuk mencapai tujuan negara wawasan kebangsaan ialah roh dari ketahanan nasional.

Dimasa-masa pengaruh globalisasi saat ini mempengaruhi ketahanan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain / menolak atau melawan arus, kita dituntut untuk dapat sama - sama bersaing dengan negara-negara lainnya, karena paradigma globalisasi saat ini ialah bila negara ingin maju tidak jadi negara tertinggal maka kita harus siap dengan globalisasi, bila kita menolak globalisasi dianggap suatu kemunduran pada negara tersebut dengan kata lain globalisasi bukan untuk di hindari tapi dihadapi.

Negara untuk dapat berperan di era globalisasi saat ini selain pembangunan

¹³ Yudhoyono, Susilo Bambang, *Menuju Negara Kebangsaan Modern. Wawasan Kebangsaan Dan Indonesia Masa Depan*, Jakarta, Brighten Press : 2004

¹⁴Erik, D Wahyudi, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman*

Wawasan Kebangsaan Di Kabupaten Majalengka, Skripsi AN FISIP UNMA, Majalengka: 2015 hal 11

¹⁵ Ibid Yudhoyono, Susilo Bambang

¹⁶ Ibid Erik, D Wahyudi hal 12

yang dilaksanakan diperlukan suatu sistem pertahanan yang mendampingi/mengawal dari awal sampai tidak terhenti negara yang berproses mencapai tujuan, karena pertahanan suatu negara ada dari wilayah-wilayah sebelum berdiri menjadi negara dan setelah menjadi negara yang berdaulat (merebut, mempertahankan kemerdekaan) dan hadir di setiap proses pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara Indonesia sesuai amanat UUDRI 1945 yang berpedoman pada Pancasila (mengisi kemerdekaan). Dengan kata lain tentara dalam mengawal pembangunan turut hadir bersama rakyat seperti apa yang di sampaikan oleh Panglima besar Jendral Soedirman "Tentara akan timbul dan tenggelam bersama sama negara". Jadi tidak harus menunggu sistem idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya tersebut lemah baru pertahanan keamanan negara mengambil perannya.

TNI untuk dapat berperan di era globalisasi saat ini diperlukan suatu sistem pertahanan semesta yang memiliki kemampuan manajemen sektor publik agar dapat mendampingi/mengawal negara yang berproses mencapai tujuannya, peran serta TNI dalam melaksanakan pembangunan bersama-sama dengan rakyat dituntut memiliki kejelasan karena di era saat ini kejelasan perencanaan sampai dengan hasil (*output*) serta dampak (*impact*) yang telah dilaksanakan diminta pertanggung jawabannya kepada publik atau transparasi.

Sebagaimana pandangan-pandangan di atas adalah situasi saat ini yang Kowil alami,

transformasi yang dilakukan tidak menghilangkan jati dirinya manunggal bersama rakyat. Sebagai tentara wilayah turut serta aktif melaksanakan pembangunan memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena sejatinya politik TNI politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi TNI. Babinsa sebagai ujung tombak Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas administratif sebagai fasilitator bersinergi bersama otoritas sipil terkait.

Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik dalam mengemban tugas kewilayahan, juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 17a) Dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi di era global seperti saat ini akan terjadi pola kehidupan di segala bidang, kemudian akan menjadi pola kehidupan berdasarkan kerjasama keorganisasian yang semakin kompleks.
- b) Pola kehidupan keorganisasian yang ada akan berkaitan dengan pola kehidupan modern dan cara berfikir secara rasional dalam merancang sebuah tata kerja.
- c) Cara berfikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
- d) Cara berfikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan dan kerasionalan dalam upaya mencapai tujuan.
- e) Berfikir dan bekerja secara rasional

¹⁷ Yunus dan Wahyudin, Teori Organisasi, Majalengka,

dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasi modern ke arah efisiensi dan efektifitas memerlukan administrasi.

Program-program TMMD, TMKBKes, Karya Bakti, dan Program Ketahanan MOU dengan kementerian terkait yang berlangsung saat ini merupakan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh negara serta menuntut kemampuan penyelenggaraan administrasi publik dimiliki aparat Kowil. Dengan demikian Kowil tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik merupakan tantangan dimasa kini dan masa akan datang.

Selain program-program di atas. Inovasi-inovasi Babinsa merupakan prestasi Kowil dalam menjalankan tugas pada tahun 2016 ¹⁸Kasad Jendral TNI Mulyono memberikan penghargaan kepada 13 orang Babinsa yang berprestasi 13 orang Babinsa tersebut berhasil membantu mengatasi kesulitan masyarakat di desa binaannya seperti yang dilakukan oleh Pelda Rusyidi Babinsa Koramil 09/Salimpaung Kodim 0307/Tanah Datar Kodam I/Bukit Barisan yang berhasil mengembangkan probiotik ternak sapi berguna bagi masyarakat peternak di wilayahnya, penemu pengurai pembenah tanah dan menggerakkan badan usaha milik Nagari. Serda Gazali, Babinsa Koramil 18/Biren Bayeum Kodim 0104/Aceh Timur Korem 011/Lila Wangsa Kodam Iskandar Muda Aceh, membantu mengatasi kelangkaan pupuk dengan menciptakan "pupuk keong" yang bisa menambah hasil panen padi

masyarakat. Serka Eko Tamono Babinsa Koramil 09/Kota Bangun Kodim 0906/Tenggarong Korem 091/Aji Surya Nata Kusuma berprestasi mendirikan TK Dahlia dengan membayar SPP hasil sampah dan mengembangkan teh serai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelda Soirin Babinsa Koramil Sukorejo Kodim 0802/Ponorogo Korem 081/Dirotsaha Jaya Kodam V/Brawijaya berprestasi menciptakan alat semprot tani otomatis bertenaga accu sepeda motor untuk kelompok tani di Sukorejo. Selain para Babinsa, Danrem dan Dandim yang berprestasi dalam program upaya khusus pemerintah dan TNI dalam melaksanakan program swasembada pangan juga menerima penghargaan dari Kasad.

Tidak hanya itu Aparatur Kowil dalam melaksanakan tugas pembinaan wilayah harus peka terhadap kesulitan masyarakat sebagaimana bentuk sikap tindakan ¹⁹Babinsa yang viral di sosial media Serka Darwis menuai pujian masyarakat setelah video kesehariannya membantu menyebrangkan warga masyarakat di Desa Maroko, Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan sebuah gondola sederhana yang tergantung di seutas tali diatas sungai berarus deras. Sementara Serda Suyono terkenal atas kesigapannya dalam insiden yang terjadi pada upacara peringatan hari kemerdekaan di lapangan kantor Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis 17/8/2017 lalu.

Kedua prajurit tersebut dianggap berprestasi atas kinerjanya dalam membantu

¹⁸ <https://tniad.mil.id/2016/11/kasad-beri-penghargaan-kepada-babinsa-berprestasi/>

¹⁹ <https://akuratnews.com/kasad-beri-penghargaan-kepada-dua-prajurit-babinsa-berprestasi/>

kesulitan masyarakat disekitarnya dan menunjukkan kesiapan layaknya seorang prajurit TNI AD yang profesional.

Transformasi yang dilakukan TNI dilaksanakan agar dapat terus sama-sama menjaga serta membangun negeri sekalipun arus globalisasi dan tuntutan profesionalisme TNI, karena sampai saat ini belum ada yang dapat menjamin bila TNI menghapus Kowil negara akan lebih maju tanpa Kowil, kalau hanya membandingkan TNI dengan militer negara lain yang tidak memiliki Kowil itu pandangan yang tidak ilmiah merajuk pada filosofis lahirnya serta mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia, karena pihak militer luar pun mengakui kekuatan TNI bersama Rakyat merupakan kekuatan yang sulit dikalahkan. Ini merupakan tantangan serta tanggung jawab kita semua untuk lebih dapat menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman hambatan gangguan tantangan dengan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pembinaan wawasan kebangsaan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Hal-hal yang dikemukakan penulis diatas gambaran tentang tugas tentara dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan turut hadir dalam pembangunan nasional merupakan aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengimplementasikan pertahanan negara sesuai konstitusi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 disamping tugas Operasi Militer untuk perang juga melakukan Operasi Militer Selain Perang.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Tuntutan reformasi TNI serta arus globalisasi bukan suatu penghalang TNI manunggal bersama Rakyat, profesionalisme TNI yaitu tentara rakyat bila TNI tidak manunggal bersama Rakyat, TNI bukanlah tentara yang profesional karena TNI bukan tentara bayaran dan negara memiliki standar untuk mengurus negaranya sesuai filosofis masing-masing negara. Jati diri TNI tidak dapat disamakan dengan militer negara lain tiap-tiap negara memiliki nilai filosofis dan geografi serta demografi yang berbeda.

Sebagai tentara profesional TNI dituntut disiplin, jago perang, menembak, bela diri dan fisik yang prima dan sebagai Tentara negara kesatuan TNI khususnya Kowil dituntut jago berinteraksi bersama rakyat dan menguasai kemampuan administrasi yang baik untuk dapat melaksanakan program-program serta inovasi-inovasi dalam membina wawasan kebangsaan terwujudnya ketahanan nasional dan kemanunggalan TNI-Rakyat. Ketahanan nasional yang tangguh dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian diperlukan pengembangan organisasi Satkowil baik personil maupun materil serta pemikiran-pemikiran intelektual dengan merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik agar dapat menganalisa kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam menghadapi ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan zaman dari globalisasi serta geopolitik masa kini, masa depan dan masa yang akan datang.

3.2 Saran

Mengembangkan Pok Tuud Kodim dengan menambah personil untuk membentuk satuan KOMPI di dalam struktur organisasi Kodim sebagai pelaksana pelayanan kebutuhan satuan yaitu membentuk KOMPI Markas agar aparat Koramil dapat lebih fokus membina wilayah binaan yang sekarang ini ditambah dengan program-program pembangunan MOU TNI dengan Kementerian terkait.

Selain itu agar lebih efektif Satuan Sub Zibang, Perhubungan, Bekang, Peralatan, Poskes dimasukkan dalam jajaran struktur organisasi Kodim agar Komandan Kodim memiliki komando penuh terhadap satuan-satuan tersebut namun pembinaan administratif tetap dibawah Komandan Detasemen masing-masing, seperti halnya satuan-satuan crops kecabangan-kecabangan di bawah Kotama dan Kodam.

Memperkuat administrasi Kodim dengan menempatkan Kowad sebagai Kehumasan dan membuka Pendidikan Secaba PK jalur khusus Kowil tamatan SMK Jurusan Pertanian, TKJ, Administrasi Perkantoran, atau menyesuaikan kebutuhan untuk ditempatkan di Kodim sebagai kekuatan administrasi publik.

Pembinaan dalam bimbingan teknis Aparatur Kowil terkait manajemen administrasi publik terprogram bersinergi dengan Aparatur Pemerintahan dan Akademisi agar dapat menganalisa ketahanan dari fenomena-fenomena dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial yang dinamis di wilayah binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Suwarno Sutikno. 2011. *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Wirman Burhan. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2004. *Menuju Negara Kebangsaan Modern. Wawasan Kebangsaan Dan Indonesia Masa Depan*. Brighten Press. Jakarta.
- Yunus, A dan Nawawi, W. 2013. *Teori Organisasi*. Unit Penerbitan Universitas Majalengka. Majalengka.
- Naskah Kontras, *Satu Dekade Keberhasilan TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)*. Ad Hoc. Surabaya.
- Herman, B. Wilayah Pertahanan, Kemanunggalan TNI-Rakyat Bagi Kejayaan Bangsa: <http://www.wilayahpertahanan.com>. 26 Juli 2015.
- Erik, D Wahyudi. 2015 *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Di Kabupaten Majalengka*, Skripsi AN-FISIP Universitas Majalengka.
- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Provinsi DIY 2012 *Seminar Kesadaran Berbangsa Bernegara*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Koran Republika Online. 2015 Wawasan Kebangsaan atau Bela Negara Bangsa Indonesia terlalu rendah. <http://www.republika.co.id/>. 25 Maret. Jakarta.

<https://tniad.mil.id/2016/11/kasad-beripenghargaan-kepada-babinsa-berprestasi/>

<https://akuratnews.com/kasad-beripenghargaan-kepada-dua-prajurit-babinsa-berprestasi>